

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Topik kajian yang akan diteliti oleh peneliti dalam tesis ini adalah analisis institusionalisasi partai politik pada pemilihan legislatif tahun 2014, dengan mengambil studi kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung. Beberapa tahun menjelang pemilu tahun 2014 sebenarnya iklim politik di Indonesia sedang dalam kondisi yang kurang baik. Hal itu dikarenakan masyarakat sudah kehilangan kepercayaan terhadap partai politik, serta sudah merasa muak dengan perilaku para pejabat maupun elit politik yang melakukan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) demi memperkaya diri sendiri, serta melakukan hal yang tidak terpuji lainnya.

Survei yang dilakukan oleh *Centre for Strategic and Internasional Studies* (CSIS) pada tanggal 13 februari 2012, menunjukkan bahwa Partai Demokrat menjadi partai yang mengalami penurunan dukungan publik terbesar dengan angka penurunan 8,25%, sehingga hanya memperoleh dukungan 12,6%. Partai Golkar diperkirakan memperoleh dukungan 10,5%, menurun 3,95% dari pemilu 2009 lalu, sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendapat dukungan 7,8%, dengan tingkat penurunan sebesar 6,23 %. Masyarakat yang tidak memiliki pilihan ketika ditanyai dukungan mereka terhadap partai politik sebanyak 48,4 % (<http://www.antaraneews.com>).

Survei kedua yang dilakukan oleh Lembaga Survei Nasional (LSN) pada tanggal 16 juli 2013, hasil rilis survei tersebut menyebutkan parpol menjadi institusi demokrasi yang kurang dipercaya dibanding institusi yang lain seperti organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan tingkat kepercayaan 57,5%, lembaga swadaya masyarakat 58,5%, lembaga pers 65,1%, dan lembaga survei 69,3%. Tingkat kepercayaan publik terhadap integritas parpol hanya sebesar 42,6%, sebanyak 53,9% mengaku kurang percaya terhadap parpol, dan sisanya 3,5% menjawab tidak tahu (<http://www.republika.co.id>).

Survei ketiga yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia pada tanggal 23 juli 2013, hasil rilis survei tersebut didapatkan hasil sebagai berikut bahwa ketidakpercayaan publik itu muncul lantaran buruknya citra lembaga politik di mata masyarakat, 67% responden mengaku tidak tertarik dengan politik. Kepercayaan masyarakat pada institusi politik juga buruk, tercermin dari 58% responden yang menyatakan tidak percaya dengan partai politik (<http://news.liputan6.com>).

Perolehan suara Partai Demokrat diperkirakan akan terjun bebas pada pileg tahun 2014, bahkan ada beberapa kalangan yang berani mengatakan bahwa Partai Demokrat tidak akan lolos *Parliamentary Threshold* (PT), yang saat ini lebih tinggi dari pileg tahun 2009 yaitu sebesar 3,5%. Menjelang pemilu tahun 2014 iklim politik di Indonesia dalam keadaan kurang baik karena banyak pejabat, politisi, atau anggota DPR yang melakukan korupsi, dalam beberapa tahun menjelang pemilu 2014 juga banyak kader atau elit Partai Demokrat yang

melakukan korupsi. Elit Partai Demokrat yang melakukan korupsi adalah M. Nazaruddin (bendahara umum), Angelina Sondakh Anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat (wasekjen), Andi Mallarangeng (sekwanbin) yang juga menjabat sebagai menpora, dan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum ditetapkan pula sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penerimaan gratifikasi pada proyek hambalang.

Partai Demokrat tentunya sangatlah dirugikan karena badai korupsi itu terjadi mendekati penyelenggaraan pemilu tahun 2014. Citra partai yang didirikan SBY tersebut sangatlah buruk di mata masyarakat, serta Partai Demokrat juga telah kehilangan kepercayaan dari masyarakat. Survei yang telah dirilis oleh *Center for Strategic and International Studies (CSIS)*, pada survei CSIS Januari 2012, dukungan terhadap Partai Demokrat sebesar 11,1%. Dukungan itu turun menjadi 7,1 % yang salah satunya disebabkan oleh konflik internal di dalam tubuh partai itu (<http://nasional.republika.co.id>).

Survei kedua dilakukan oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI), hasilnya suara Partai Demokrat merosot dari survei di bulan Januari 2011, yakni sebesar 20,5%. LSI pada Januari 2012 kembali melakukan survei dan hasilnya elektabilitas parpol pimpinan SBY itu kembali merosot ke angka 13,7%. Survei LSI terbaru yang dilakukan 12 September - 5 Oktober 2013, elektabilitas Demokrat kembali turun ke angka 9,8% (<http://nasional.kompas.com>).

Survei ketiga dilakukan oleh Harian Kompas, Partai Demokrat masih memiliki simpanan dukungan suara 11,1% pada periode pertama survei yang hasilnya dirilis pada Desember 2012. Angka ini turun 1% menjadi 10,1% pada periode kedua dengan rilis hasil pada 2013, setelah melewati momentum penetapan tersangka di Komisi Pemberantasan Korupsi atas mantan ketua umum partai, Anas Urbaningrum. Periode ketiga, saat konvensi untuk mencari kandidat calon presiden untuk diusung Partai Demokrat sudah bergulir, perolehan dukungan suara partai tak juga tertolong. Survei ketiga justru menunjukkan kembali merosotnya dukungan untuk Partai Demokrat, menjadi 7,2% saja (<http://nasional.kompas.com>).

Survei di atas tentunya menjadi peringatan keras bagi Partai Demokrat. Partai Demokrat yang merupakan partai pemenang pemilu tahun 2009 dan berhasil mengantarkan SBY menduduki kursi RI 1 sebanyak dua kali, haruslah menjaga marwah serta kehormatannya sebagai salah satu partai besar di negeri ini. SBY dan para kader Partai Demokrat tentunya harus berfikir dan bekerja ekstra keras untuk menyelesaikan prahara yang menimpa partainya tersebut yang diakibatkan oleh perilaku beberapa kader yang melakukan korupsi. Perolehan suara Partai Demokrat pada pileg tahun 2014 diperkirakan akan turun jauh dibandingkan perolehan suara pada pileg tahun 2009 dengan melihat beberapa hasil survei di atas.

Hasil pileg pada tanggal 9 April tahun 2014 yang lalu, Partai Demokrat mendapatkan suara sah secara nasional sebesar 10,19% (Hasil Rekapitulasi KPU RI). Hasil tersebut tentunya sangat menggembirakan bagi Partai Demokrat, karena meskipun perolehan suara pada pileg tahun 2014 sangat jauh menurun jika dibandingkan tahun 2009, tetapi paling tidak dengan perolehan suara sebesar 10,19% itu jauh lebih baik dibandingkan dengan hasil beberapa survei yang menunjukkan bahwa perolehan suara Partai Demokrat tidak mencapai 10%. Partai Demokrat mendapatkan suara sebesar 10,19%, disamping itu Partai Demokrat juga berhak mendapatkan 61 kursi DPR RI (Keputusan KPU RI). Berikut adalah tabel partai politik yang lolos *Parliamentary Threshold* (PT) pada pileg tahun 2014:

Tabel I.1

Partai Politik Yang Lolos *Parliamentary Threshold* Tahun 2014

No	Nama Partai Politik	Jumlah Suara	Presentase
1.	PDI Perjuangan	23.681.471	18,95 %
2.	Partai Golkar	18.432.312	14,75 %
3.	Partai Gerindra	14.760.371	11,81 %
4.	Partai Demokrat	12.728.913	10,19 %
5.	PKB	11.298.957	9,04 %
6.	PAN	9.481.621	7,59 %
7.	PKS	8.480.204	6,79 %
8.	Partai NasDem	8.402.812	6,72 %
9.	PPP	8.157.488	6,53 %
10.	Partai Hanura	6.579.098	5,26 %

Sumber: www.kpu.go.id

Berdasarkan uraian singkat di atas maka dapat ditarik sebuah hipotesis, bahwa hasil yang telah diperoleh Partai Demokrat tersebut bukanlah sesuatu yang mudah didapat. Untuk memperoleh hasil tersebut, membutuhkan kerja keras dari

seluruh pengurus Partai Demokrat dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Keberhasilan Partai Demokrat di atas, apakah karena faktor institusionalisasi partai yang telah dilakukan sehingga berpengaruh terhadap perolehan suara partai atau karena faktor lain seperti patronase dan klientelisme pada pemilu.

Peneliti dalam melakukan penelitian ini membatasi objek penelitian dengan mengambil studi kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, hal ini penulis lakukan karena mengingat keterbatasan kemampuan penulis dari segi biaya, waktu, serta tenaga. Prestasi yang telah diperoleh Partai Demokrat pada tingkat nasional, yang berhasil menembus *Parliamentary Threshold* (PT) serta tetap *survive* dalam pileg tahun 2014, tentunya tidak luput dari sumbangsih serta peran dari DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.

Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014 berhasil mendapatkan 11 kursi DPRD di Provinsi Lampung dan menempati posisi kedua perolehan kursi terbanyak, meskipun jika dibandingkan tahun 2009 perolehan kursi tersebut turun sebanyak 3 kursi, pada tahun 2009 tersebut Partai Demokrat menjadi pemenang di Provinsi Lampung dengan 14 kursi. Merosotnya perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Lampung, tidaklah terlalu buruk jika dibandingkan dengan perolehan kursi di DPRD Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Partai Demokrat di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 mendapatkan 16 kursi DPRD (<http://jateng.bps.go.id/>), sedangkan tahun 2014 Partai Demokrat hanya mendapatkan 9 kursi DPRD Jawa Tengah (<http://www.antarajateng.com>).

Penurunan perolehan kursi DPRD di Provinsi Jawa Barat yang dialami Partai Demokrat juga sangat jauh merosot, pada tahun 2009 Partai Demokrat mendapat 28 kursi DPRD (<http://diskominfo.jabarprov.go.id>) namun pada tahun 2014 Partai Demokrat hanya mendapat 12 kursi DPRD (<http://www.rumahpemilu.org>). Partai Demokrat di Provinsi Jawa Timur juga mengalami penurunan perolehan kursi DPRD yang cukup banyak, dari perolehan kursi sebanyak 22 kursi pada tahun 2009 (<http://regional.kompas.com>), namun Partai Demokrat di Jawa Timur pada tahun 2014 hanya memperoleh 13 kursi DPRD (<http://suarapubliknews.net>). Perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD DKI Jakarta sangat menurun drastis dibandingkan dengan tahun 2009, pada tahun 2009 Partai Demokrat DKI Jakarta mendapat 32 kursi DPRD (<http://metro.news.viva.co.id>), namun pada tahun 2014 Partai Demokrat hanya mendapatkan 10 kursi saja (<http://www.dprd-dkijakartaprov.go.id>).

Partai Demokrat Provinsi Lampung bisa dikatakan cukup *survive* pada pileg tahun 2014 jika dibandingkan dengan empat provinsi lain seperti data di atas, meskipun terjadi penurunan perolehan kursi namun perolehan kursi Partai Demokrat di Provinsi Lampung cukup stabil karena hanya menurun 3 kursi jika dibandingkan dengan 2009. Berikut ini adalah daftar penurunan kursi DPRD Partai Demokrat di lima provinsi:

Tabel I.2

Daftar Penurunan Perolehan Kursi DPRD Partai Demokrat

No	Nama Partai/Provinsi	Perolehan Kursi 2009/Status	Perolehan Kursi 2014/Status	Presentase Penurunan
1.	Partai Demokrat/Lampung	14 Kursi/Pemenang	11Kursi/Peringkat Kedua	21,43%
2.	Partai Demokrat/Jawa Timur	22 Kursi/Pemenang	13 Kursi/Peringkat Empat	40%
3.	Partai Demokrat/Jawa Tengah	16 Kursi/Peringkat Kedua	9 Kursi/Peringkat Enam	43,75%
4.	Partai Demokrat/Jawa Barat	28 Kursi/Pemenang	12 Kursi/Peringkat Empat	57,14%
5.	Partai Demokrat/DKI Jakarta	32 Kursi/Pemenang	10 Kursi/Peringkat Lima	68,75%

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Data di atas menunjukkan bahwa Partai Demokrat Provinsi Lampung cukup kuat serta mapan dalam pemilu, karena tidak mudah bagi sebuah partai politik yang mengalami kemrosotan citra di mata publik atau masyarakat untuk bertahan (*survive*) pada pemilu ditengah badai korupsi yang menimpa elit partainya. Berikut ini adalah daftar perolehan kursi partai politik di DPRD Provinsi Lampung:

Tabel I.3

Perolehan Kursi Partai Politik Di DPRD Provinsi Lampung

No	Nama Partai Politik	Perolehan Kursi
1.	PDI Perjuangan	17 Kursi
2.	Partai Demokrat	11 Kursi
3.	Partai Golkar	10 Kursi
4.	Partai Gerindra	10 Kursi
5.	PKS	8 Kursi
6.	PAN	8 Kursi
7.	Partai NasDem	8 Kursi
8.	PKB	7 Kursi
9.	PPP	4 Kursi
10.	Partai Hanura	2 Kursi

Sumber: www.dprd-lampungprov.go.id

Melihat perolehan kursi Partai Demokrat di DPRD Provinsi Lampung di atas, yang berhasil mendapatkan 11 kursi DPRD dan menjadi pemenang nomor dua serta tidak mengalami penurunan perolehan kursi yang sangat signifikan jika dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Maka dengan demikian menunjukkan bahwa sebenarnya Partai Demokrat Provinsi Lampung cukup sukses dalam menjaga perolehan kursi partai, ditengah kondisi iklim politik yang buruk serta kepercayaan publik yang menurun terhadap

partainya. Partai Demokrat Provinsi Lampung tetap *survive* dan meraup suara apalagi mendapat kursi yang cukup stabil di DPRD Provinsi Lampung.

Kestabilan dalam memperoleh suara atau kursi DPRD merupakan salah satu indikator dari institusionalisasi partai. Institusionalisasi partai adalah suatu kondisi dimana partai politik menjadi stabil, kuat, serta mapan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mendefinisikan sosok kiprahnya di dalam masyarakat sesuai dengan ideologi, nilai-nilai, serta platform partai tersebut. Partai Demokrat Provinsi Lampung juga telah melakukan pergantian pimpinan partai sebanyak tujuh kali, hal itu tentunya sangat menarik apabila dibandingkan dengan pergantian pimpinan partai di tingkat pusat yang baru berganti pimpinan sebanyak tiga kali. Jumlah pergantian pimpinan partai juga merupakan salah satu indikator dari institusionalisasi partai, berdasarkan fenomena tersebut maka akan sangat menarik jika dilakukan penelitian terkait institusionalisasi partai. Tetapi apakah keberhasilan Partai Demokrat Provinsi Lampung dalam pileg tahun 2014 tersebut murni karena faktor institusionalisasi atau karena faktor lain seperti patronase dan klientelisme dalam pemilu.

Patronase politik adalah pertukaran keuntungan demi memperoleh dukungan politik. Perlu ditekankan disini bahwa unsur pertukaran dalam patronase terkadang problematik. Ketika kandidat mendistribusikan hadiah atau membayar pemilih, sebenarnya mereka tidak yakin dengan bentuk respons balik yang akan diberikan oleh pemilih (Aspinall & Sukmajati 2015:22). Patronase politik akan berjalan efektif apabila dengan membentuk relasi yang murni klientelistik, dengan demikian relasi ini tidak semata-mata berupa pertukaran

material jangka pendek (*one-off material exchange*) antara kandidat dan pemilih, tetapi menjadi bagian pembentukan relasi jangka panjang yang sama-sama menguntungkan dua pihak, pengulangan seperti ini adalah ciri penting dari klientelisme. Para kandidat biasanya memberikan penghargaan kepada para anggota tim sukses, tidak hanya dengan membayar uang, tetapi juga dengan janji untuk memberikan pekerjaan, kontrak, atau keuntungan lainnya (Aspinall & Sukmajati 2015:35).

Keberhasilan Partai Demokrat Provinsi Lampung untuk tetap *survive* pada pileg tahun 2014 bisa dilihat atau dianalisis melalui pendekatan teori institusionalisasi partai, namun fenomena *survivenya* Partai Demokrat Provinsi Lampung tersebut bisa dilihat atau dianalisis pula melalui pendekatan teori patronase politik dan klientelisme dalam pemilu. Partai politik di Indonesia sebenarnya pada saat ini masih sangat jauh dari proses institusionalisasi, karena masih sangat banyak sekali partai politik di Indonesia yang masih tergantung pada sosok kekuatan figur dan cenderung mengarah pada oligarki politik. Disisi lain banyak kandidat (caleg) yang bertarung dalam pemilu yang menggunakan strategi patronase maupun klientelisme untuk memobilisasi dukungan guna memenangkan pemilu, hal itu tentunya juga menguntungkan partai politik itu sendiri sebagai pengusung sang kandidat (caleg) karena suara yang diberikan kepada kandidat (caleg) secara otomatis juga diberikan kepada partai. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang ***Analisis Institusionalisasi Partai Politik Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 (Studi Kasus DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung)***.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui dua hal yang berkaitan dengan DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung yaitu:

1. Bagaimana tingkat institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung?
2. Apakah perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014 dipengaruhi oleh faktor institusionalisasi partai atau dipengaruhi oleh faktor lain seperti patronase dan klientelisme?

I.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

I.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis tingkat institusionalisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui faktor manakah yang paling dominan dalam mempengaruhi perolehan suara DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung pada pileg tahun 2014.

I.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah :

I.3.2.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan teori institusionalisasi partai politik, teori patronase politik, dan teori klientelisme dalam pemilu.

I.3.2.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan rekomendasi kepada partai politik, khususnya DPD Partai Demokrat Provinsi Lampung, agar kedepan dapat dilakukan berbagai evaluasi terkait dengan institusionalisasi partai. Sedangkan untuk para akademisi penelitian ini dapat dijadikan sebuah referensi dalam kajian tentang institusionalisasi partai politik, patronase politik, serta klientelisme dan bisa dijadikan sebagai dasar untuk penelitian-penelitian lain dengan kajian yang sejenis.